

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TATA TERTIB DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2020  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**Disusun Oleh :**

**NUR AMINA HARAHAHAP**

**1910012111056**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PADANG**

**2023**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No.Reg: 16 Skripsi/HTN/II-2023**

Nama : **Nur Amina Harahap**  
NPM : **1910012111056**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Tata Tertib Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2020  
Kabupaten Padang Lawas Utara**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H ( Pembimbing)



---

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2020 KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA**

Nur Amina Harahap<sup>1</sup>, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.  
Email : [nuramina46@gmail.com](mailto:nuramina46@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Rules of Procedure are internal regulations that apply within the DPRD internal environment. The regulation that applies in North Padang Lawas Regency is DPRD Regulation Number 01 of 2020 concerning Rules of Procedure. The formulation of the problem is: 1) How effective is the implementation of the Standing Orders of the Regional People's Representative Council in North Padang Lawas Regency? 2) What are the obstacles faced by the Regional People's Representative Council in implementing the Rules of Procedure in North Padang Lawas Regency? 3) What efforts have been made by the DPRD in overcoming obstacles in the implementation of the Standing Orders of the House of Representatives in North Padang Lawas Regency? This type of research is sociological juridical. Sources of data are primary data and secondary data with data collection techniques are interviews and document studies, data qualitative analysis. Research Results 1) The effectiveness of the implementation of the Rules and Practices in the North Padang Lawas Regency DPRD is not yet effective 2) The obstacles faced by the North Padang Lawas Regency DPRD are communication that is not in line with members which causes the performance of the North Padang Lawas Regency DPRD not optimal 3) The efforts made by the North Padang Lawas DPRD pay attention to input from other DPRD members who have different opinions, views, and interests, so that mutual understanding of the input is relevant to the vision and mission in order to realize deliberations for consensus.*

***Keywords : DPRD, Effectiveness, North Padang Lawas District***

Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota menjelaskan hal yang terdapat adalah Peraturan DPRD Peraturan DPRD.

Tata Tertib yang berlaku di Kabupaten Padang Lawas Utara diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib. Tata Tertib yang berlaku di Kabupaten Padang Lawas Utara diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TATA TERTIB DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2020 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam pelaksanaan Tata Tertib di Kabupaten Padang Lawas Utara?

3. Upaya apa saja yang dilakukan DPRD dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa efektivitas pelaksanaan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan Tata Tertib di Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Untuk menganalisa upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Padang Lawas Utara.

### II. Metode Penelitian

- a. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis
- b. Sumber Data
  1. Data Primer
  2. Data Sekunder
- c. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen
- d. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Pelaksanaan Tata Tertib DPRD di Kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan hasil data yang ditemukan di Kantor DPRD yaitu:

**Tabel 1**

**Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan DPRD Paluta**

No	Program	Capaian 2022	Target
1	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten	5 kali	6 kali
2	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 kali	5 kali
3	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Doc	4 Doc
4	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA OPD	2 Doc	2 Doc
5	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 stell	60 stell
6	Penyusunan dan Pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	9 Doc	20 Doc
7	Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	12 Kec	12 Kec

Sumber: Sekretariat DPRD Paluta 2022

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang dari DPRD Padang Lawas Utara belum efektif dikarenakan masih banyak sasaran kinerja yang belum sesuai dengan target sarannya. Pelaksanaan Tata Tertib belum tergolong baik karena masih banyak hal yang harus di capai dan sesuai dengan target.

#### **B. Kendala yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan Tata Tertib di Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam Tata Tertib DPRD tentunya mengalami kendala yang dialami oleh DPRD Kota Padang antara lain sebagai berikut :

1. Adanya komunikasi yang tidak sejalan dengan anggota fraksi lainnya dimana berbagai keputusan lebih berfokus pada kepentingan politis.
2. Kedisiplinan anggota DPRD dalam menghadiri setiap rapat menjadi hal yang menonjol.
3. Ketidaksamaan pendapat masing-masing anggota DPRD Padang Lawas Utara yang memperhatikan masukan dari anggota DPRD.

#### **C. Upaya DPRD Padang Lawas Utara dalam menghadapi kendala DPRD**

1. Melakukan komunikasi antar fraksi yang lebih baik ke depannya dan lebih optimal dalam bekerja
2. Memverifikasi daftar hadir anggota DPRD lalu menyurati tiap-tiap fraksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna secara berlangsung.
3. DPRD melakukan komunikasi antar anggota, silaturahmi baik.

### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Efektivitas pelaksanaan Tata

Tertib di Kabupaten Padang Lawas Utara tergolong belum efektif. Banyak sasaran kinerja dari DPRD paluta yang belum sesuai dengan targetnya.

2. Kendala DPRD dalam pelaksanaan Tata Tertib yaitu:
  - a. Adanya komunikasi yang tidak sejalan dengan anggota fraksi lainnya.
  - b. Kedisiplinan anggota DPRD dalam menghadiri setiap rapat.
  - c. Ketidaksamaan pendapat masing-masing anggota DPRD.
3. Upaya DPRD dalam menghadapi kendala DPRD yaitu:
  - a. Melakukan komunikasi antar fraksi yang lebih baik.
  - b. Memverifikasi daftar hadir anggota DPRD.
  - c. Melakukan komunikasi antar anggota, silaturahmi baik.

#### **B. SARAN**

1. Memberikan sanksi kepada Anggota DPRD yang tidak hadir rapat sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penyuluhan, pembinaan, dialog atau seminar tentang DPRD pada masyarakat dari tiap-tiap anggota DPRD.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan waktunya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan serta penulis mengucapkan juga kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimarati S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Serta pihak terkait yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**

Rudy Suhardjo, 2004, *Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten/Kota*, Cetakan ke-1, Aneka Ilmu, Semarang

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

### **C. SUMBER LAIN :**

Inggit, Andi Bau, Abdul Razak, And Anshory Ilyas. "*Hakikat Peraturan DPRD Tentang Tatib Kota Makassar.*"

Mahardita, H. R. 2017, Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Rizka Desri Yusfita, "Massa Soroti Kinerja Andar Amin